



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIMRAN

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : 525276

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 525.000.000

1. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA KENDARI, HIBAH DENGAN

AKTA Rp. 45.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.800 m²/252 m² di KAB / KOTA

MUNA BARAT, WARISAN Rp. 420.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/240 m² di KAB / KOTA

MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG GRAND MINI BUS Tahun 1996, HASIL

SENDIRI , LAINNYA , Rp. 35.000.000

2. MOTOR, YAMAHA RX KING RX KING Tahun 2003, LAINNYA Rp.

5.000.000

3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z 1 SEPEDA MOTOR SOLO Tahun

2012, LAINNYA Rp. 9.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI CARRY OPEN Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 650.500.000

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

650.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.